

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- _____, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusioanl di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderl dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Aziz, M. Noor , *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, 2011).
- Cristin, Dri Utari dan Ismail hasani (ed), *Masa depan Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013).
- Elmuhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005).
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- _____, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Kajian Dari Aspek Tugas dan Wewenangnya)*, (Bandung: CV. Utomo, 2007).
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembautan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Huda, Nimatul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

- Ida, Laode, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Government*, (Jakarta: PSPK, 2002).
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: Mizan, 2007).
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: PT. Alumni, 1976).
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legilature ke Positive Legislature?*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Soemitro, Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003).
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, (Malang: UMM Press, 2003).
- Surbakti, Ramelan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992).
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan MK Nomor 06/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel, Jurnal, Makalah dan Laporan

Arundhati, Gautama Budi, “Penderogasian Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009.” *Jurnal Konstitusi* Volume I Nomor 1, November 2009, halaman 55.

Asshidiqie, Jimly, “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Asy'ari, Syukri, dkk., “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012).” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Bisariyadi, dkk., “Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.” (Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2016).

Fadel, “Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia.” (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2012).

Faqih, Mariyadi, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat.” (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Gaffar, Janedjri M., “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2013, halaman 001-032.

H. Djauhari, “Problematisa Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis).” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, halaman 30.

- Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Muchtar, “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 441-442.
- Irawati, “Analisis Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Balikpapan Oleh Partai Golkar Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015.” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 3, 2016, halaman 1133-1144.
- Kapitan, Rian Van Frits, “Kekuatan Mengikat Putusan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 44 Nomor 4, 2015, halaman 513.
- Lowing, Nixon S., “Persyaratan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013 Edisi Khusus, halaman 124-132.
- Mahkamah Konstitusi, *Harmoni Sosial Dan Budaya Demokrasi Yang Berkeadilan*, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2016, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat MK RI, 2017).
- Matompo, Osgar S., “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat.” *Jurnal Media Hukum* Universitas Muhammadiyah Palu, halaman 58.
- Putra, Gugum Ridho, “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.” (skripsi sarjana hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012).
- Rahayu, “Dampak Globalisasi Terhadap Perkembangan Kesadaran Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 39 Nomor 4, Desember 2010, halaman 310.
- Saraswati, Retno, “Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 40 Nomor 2, 2011, halaman 196-201.
- Satya J. A. P, Ganda Surya, “Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 43 Nomor 2, April 2014, halaman 199.
- Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45 Nomor 2, April 2016, halaman 157-163.

Syahrizal, Achmad, "Problematik Implementasi Putusan MK." *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2007, halaman 123.

Widyastanti, Nur, "Kedudukan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia." (Tesis pasca Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005).

Internet

Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, diambil dari <http://www.kpu.go.id/index.php/post/categories/MTE/pengumuman> pada 25 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/narapidana>, pada tanggal 29 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi, 2015, "Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI." diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11767#.WTT0YoyGPIU> pada tanggal 26 September 2017.

Mahkamah Konstitusi RI, "Peradilan." diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Mahkamah&menu=2> pada tanggal 29 September 2017.